

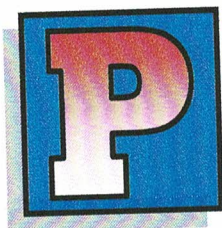
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. PASAMAN BARAT**

**Jln. Cindua Mato, Pasaman Baru,
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat**

KATA PENGANTAR



uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di akhir tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional (3) Laporan Equitas (4) Neraca, (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* didasarkan pada pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*.

Kami akan tetap terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Simpang Empat, 29 Maret 2022
KEPALA BADAN,

DEFI IRAWAN, S.Pd
NIP. 19660403 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional (3) Laporan Perubahan Ekuitas (4) Neraca dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah diusahakan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah berusaha menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Simpang Empat, 29 Maret 2022
KEPALA BADAN,

DEFI IRAWAN, S.Pd
NIP. 19660403 199103 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	x
NERACA	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
C.. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	4
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	4
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
3.1. Kebijakan Akuntansi	14
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	28
4.1.1. Pendapatan	28
4.1.2. Belanja	28
4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	33
4.2.1. Pendapatan LO	33
4.2.2. Beban	33
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	39
4.3.1. Ekuitas Awal	40
4.3.2. Surplus Defisit – LO	40

4.3.3.Dampak Kumulatif Perubahan	
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	40
4.3.4. Ekuitas Akhir	41
4.4. Penjelasan Pos-pos Neraca	41
4.4.1.Aset Lancar	41
4.4.2.Aset Tetap	42
4.4.3.Aset Lainnya	46
4.4.4.Kewajiban	47
4.4.5.Ekuitas	47
BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	48
5.1. Kedudukan dan Struktur Organisasi	48
5.2. Sasaran Pembangunan/Visi & Misi Organisasi	67
BAB VI. PENUTUP	68
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.12		Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi : 4.12.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	5.250.610.314,00	4.742.192.712,00	90,32	3.722.403.793,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.213.266.556,00	4.704.964.712,00	90,25	3.504.260.293,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.199.954.214,00	2.018.205.214,00	91,74	1.893.322.463,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.610.068,00	1.623.057.224,00	83,25	1.610.937.830,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.063.702.274,00	1.063.702.274,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	37.343.758,00	37.228.000,00	99,69	218.143.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.343.758,00	37.228.000,00	99,69	146.968.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	71.175.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.250.610.314,00)	(4.742.192.712,00)	90,32	(3.722.403.793,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.250.610.314,00)	(4.742.192.712,00)	90,32	(3.722.403.793,00)
Simpang Empat, 31 Desember 2021					
KEPALA BADAN					
DEFI IRAWAN S.Pd					
NIP. 196604031991031009					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
Halaman VI					



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.12		Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi : 4.12.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	4.771.664.241,00	3.616.929.244,00	1.154.734.997,00	31,93
8.1.1	Beban Pegawai	2.018.205.214,00	1.893.322.463,00	124.882.751,00	6,60
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.623.504.576,00	1.623.215.428,00	289.148,00	0,02
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	1.063.702.274,00	0,00	1.063.702.274,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.252.177,00	100.391.353,00	(34.139.176,00)	(34,01)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.12 Unit Organisasi : 4.12.01 Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.771.664.241,00)	(3.616.929.244,00)	(1.154.734.997,00)	31,93
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.771.664.241,00)	(3.616.929.244,00)	(1.154.734.997,00)	31,93
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.771.664.241,00)	(3.616.929.244,00)	(1.154.734.997,00)	31,93
Simpang Empat, 31 Desember 2021 KEPALA BADAN DEFI IRAWAN S.Pd NIP. 196604031991031009					
LAPORAN OPERASIONAL					Halaman VIII



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	503.380.054,00	397.905.505,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.771.664.241,00)	(3.616.929.244,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.742.192.712,00	3.722.403.793,00
EKUITAS AKHIR	473.908.525,00	503.380.054,00

Simpang Empat, 31 Desember 2021
KEPALA BADAN

DEFI IRAWAN S.Pd
NIP. 196604031991031009



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	780.000,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	780.000,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.267.173.167,00	1.302.695.167,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	98.682.500,00	98.682.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.000.000,00	40.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.103.647.492,00)	(1.110.145.315,00)
JUMLAH ASET TETAP	302.208.175,00	331.232.352,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		

Halaman X

Urusan Pemerintahan : 4 . 12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
URAIAN	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	173.160.000,00	173.160.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	173.160.000,00	173.160.000,00
JUMLAH ASET	476.148.175,00	504.392.352,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	2.239.650,00	1.012.298,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.239.650,00	1.012.298,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.239.650,00	1.012.298,00
EKUITAS		
EKUITAS	473.908.525,00	503.380.054,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	476.148.175,00	504.392.352,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 . 12		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik	
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Bantu	1.309.523,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.542.143,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 01	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.064.986,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	25.748.833,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.405.467,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 03	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	193.600,00	0,00
8 . 2 . 1 . 10 . 01	Beban Penyusutan Komputer Unit	13.830.417,00	0,00
8 . 2 . 1 . 10 . 02	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	9.157.208,00	0,00
JUMLAH		66.252.177,00	0,00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber daya tersebut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Dalam Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca , yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan per tanggal laporan. Neraca harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.

Neraca juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

Catatan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamanatkan desentralisasi laporan Keuangan.

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber kepada pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang pedoman penetapan standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program,
- Bab III Kebijakan Akuntansi**, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab V Informasi Non Keuangan**, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya
- Bab VI Penutup**

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2021 adalah sebesar 90,36% yang terdiri atas 6 Program yang dirinci dalam 12 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri atas 3 Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 2.386.304.214,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 PNS	2.121.874.214
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Orang	207.250.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	57.180.000
Jumlah			2.386.304.214

b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Terdiri atas 1 Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 17.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Orang	17.350.000
Jumlah			17.350.000

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri atas 1 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 25.590.095,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	25.590.095
Jumlah			25.590.095

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri atas 4 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp.343.587.643,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	60.369.440
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	11.779.100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	28.935.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	242.504.103
Jumlah			343.587.643

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri atas 1 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp.12.125.718,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan Mebel	5 Unit	12.125.718
Jumlah			12.125.718

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 80.771.560,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	45.191.560
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	35.580.000
Jumlah			80.771.560

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri atas 3 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa

Pemeliharaan Barang Milik Daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 78.397.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	40.587.250
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	20.879.750
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	16.930.000
Jumlah			78.397.000

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pamcasila dan Karakter Kebangsaan

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, indikator masukan yaitu dana total Rp. 87.692.700,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	87.692.700
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-
Jumlah			87.692.700

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa , Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, indikator masukan yaitu dana total Rp. 1.160.885.624,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	29.256.350
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Parpol	1.131.629.274
Jumlah			1.160.885.624

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Terdiri atas 1 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, indikator masukan yaitu dana total Rp.93.856.000 ,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	93.856.000
Jumlah			93.856.000

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, indikator masukan yaitu dana total Rp. 217.765.560 ,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Kali	104.605.360
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	113.160.200
Jumlah			217.765.560

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Terdiri atas 2 Sub kegiatan dengan indikator capaian program berupa Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, indikator masukan yaitu dana total Rp. 746.284.200 ,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Kali	586.499.150
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Kali	159.785.050
Jumlah			746.284.200

Adapun rincian realisasi keuangan Per Sub kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	%
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	18 PNS	2.121.874.214	1.943.295.214	91.58	91,58
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Orang	207.250.000	198.350.000	95.71	95,71
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	57.180.000	57.010.000	99.70	99,70
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Orang	17.350.000	17.350.000	100.00	100,00
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	2 Orang	25.590.095	5.835.800	22.80	22,80
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	60.369.440	58.051.440	96	96,16
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	11.779.100	11.374.500	96.57	96,57
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	28.935.000	23.648.000	81.73	81,73
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pada SKPD	12 Kali	242.504.103	235.017.192	96.91	96,91
10	Pengadaan Mebel	5 Unit	12.125.718	12.118.000	99.94	99,94
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	45.191.560	33.318.482	73.73	73,73
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	35.580.000	25.214.000	70.87	70,87
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	40.587.250	33.736.750	83.12	83,12
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1 Unit	20.879.750	18.335.250	87.81	87,81
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	16.930.000	12.855.000	82.01	75,93
16	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangs, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	87.692.700	76.124.300	86.81	86,81

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	%
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	-	-	0	0,00
18	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	29.256.350	28.432.100	97,18	97,18
19	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Parpol	1.131.629.274	1.121.278.224	99,09	99,09
20	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	93.856.000	88.335.250	94,12	94,12
21	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Kali	104.605.360	68.280.800	65,27	65,27
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	113.160.200	105.156.250	92,93	92,93
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Kali	586.499.150	520.964.500	88,83	88,83

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	%
24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Kali	159.785.050	48.262.400	30,20	30,20
Sub Jumlah I			5.250.610.314	4.742.192.712	90,32	90,32

Untuk realisasi keuangan pada tahun 2021 yang tidak mencapai 75% adalah

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan yang hanya mencapai 22,80% karena kegiatan intinya tidak dilaksanakan disebabkan Covid – 19.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang hanya mencapai 73,73% karena pembayaran listrik dianggarkan sebesar Dua Juta Rupiah Per Bulan dan di tahun 2020 ada pembayaran listrik mencapai Dua Juta Rupiah, tetapi pada tahun 2021 rata – rata pembayaran Listrik di bawah Dua Juta Rupiah.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang hanya mencapai 70,87% karena adanya sisa dari penambahan daya (10%), adanya uang lembur yang tidak dibayarkan karena keluarnya standar biaya yang melarang pembayaran uang lembur THL sehingga bersisa 94%, kemudian jasa iklan Cuma bisa di bayarkan 20%.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang hanya mencapai 65,27% karena Indikator dari kegiatan FKUB Pelaksanaan rapat sebanyak 4 kali namun dalam anggaran yang tersedia hanya 3 kali sehingga anggaran tidak terealisasi seluruhnya, kemudian untuk efisiensi dan penghematan yang direncanakan belanja sewa gedung namun realisasinya dilaksanakan di balkon kantor Bupati sehingga anggaran ini tidak terealisasi, dan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang ada di anggaran perubahan tidak terakomodir perjalanan seluruhnya.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang hanya mencapai 30,20% karena Untuk penghematan dan efisiensi anggaran disebabkan karena honor / narasumber FKDM yang tidak terealisasi seluruhnya, selanjutnya penghematan anggaran yang direncanakan untuk belanja sewa gedung namun realisasinya dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran sewa, kemudian untuk anggaran dinas khususnya dalam daerah tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan anggaran tersedia di perubahan.